



**ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR  
TERHADAP KEBERDAYAAN ISTRI NELAYAN  
MELALUI PERAN KOPERASI  
(STUDI KASUS RUMAH TANGGA MASYARAKAT PESISIR  
KECAMATAN PUGER)**

*Analysis of Coastal Development Policy to the Fisherman's Wife Empowerment  
through Cooperative Role (Case Study of Household Kecamatan Puger)*

**SKRIPSI**

Oleh

**EDHO CAHYA KUSUMA**

**070810101194**

**ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2014**



**ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR  
TERHADAP KEBERDAYAAN ISTRI NELAYAN  
MELALUI PERAN KOPERASI  
(STUDI KASUS RUMAH TANGGA MASYARAKAT PESISIR  
KECAMATAN PUGER)**

*Analysis of Coastal Development Policy to the Fisherman's Wife Empowerment  
through Cooperative Role (Case Study of Household Kecamatan Puger)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Manajemen (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**EDHO CAHYA KUSUMA**

**070810101194**

**ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2014**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**UNIVERSITAS JEMBER– FAKULTAS EKONOMI**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : EDHO CAHYA KUSUMA

NIM : 070810101194

Jurusan : ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN

Konsentrasi : EKONOMI REGIONAL

Judul Skripsi : **ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN  
WILAYAH PESISIR TERHADAP  
KEBERDAYAAN ISTRI NELAYAN MELALUI  
PERAN KOPERASI (STUDI KASUS RUMAH  
TANGGA MASYARAKAT PESISIR  
KECMATAN PUGER)**

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini, Saya buat dengan sebenarnya.

Jember, 29 September 2014

Yang menyatakan,

**EDHO CAHYA KUSUMA**  
NIM 070810101194

**JUDUL SKRIPSI****ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR  
TERHADAP KEBERDAYAAN ISTRI NELAYAN MELALUI PERAN  
KOPERASI (STUDI KASUS RUMAH TANGGA MASYARAKAT PESISIR  
KECAMATAN PUGER)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh ;

Nama : EDHO CAHYA KUSUMA

NIM : 070810101194

Jurusan : ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal ;

3 Oktober 2014

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

**Susunan Tim Penguji**

1. Ketua : Drs. Badjuri, M.E. (.....)  
NIP. 195312251984031002
2. Sekretaris : Dr. Sebastiana Viphindartin M.Kes (.....)  
NIP. 196411081989022001
3. Anggota : Drs. Sunlip Wibisono M.Kes (.....)  
NIP. 195812061986031003

**FOTO****4 x 6 cm**

Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi  
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.  
NIP. 19630614 19900 2 100

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dipersembahkan kepada ;

1. Orang tuaku Dwi Rostiana dan Joni Ali.
2. Saudaraku, Bobbyn Bagus dan Kioen
3. Almamaterku UNIVERSITAS JEMBER.

## **MOTTO**

Ilmu ekonomi membahas drama terbesar dari seluruh umat manusia  
...yakni perjuangan umat manusia untuk melepaskan diri dari  
dekapan keinginan.  
( John M. Ferguson)

Di selat, kita selalu melihat pulau seberang itu, meskipun sayup-sayup: Kita tahu  
kita tidak pernah sendiri, terkucil dan terpenjara. Kita tahu sejarah nusantara ini  
adalah sejarah migrasi, kisah-kisah nenek moyang yang pelaut, tambo para  
saudagar, perompak, penyelundup, perantau, dan penjelajah. Kita tahu pantai-  
pantai itu adalah pintu yang tak akan bisa dikunci.  
(Goenawan Mohammad)



**ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR  
TERHADAP KEBERDAYAAN ISTRI NELAYAN  
MELALUI PERAN KOPERASI  
(STUDI KASUS RUMAH TANGGA MASYARAKAT PESISIR  
KECAMATAN PUGER)**

*Analysis of Coastal Development Policy to the Fisherman's Wife Empowerment  
through Cooperative Role (Case Study of Household Kecamatan Puger)*

**SKRIPSI**

Oleh

**EDHO CAHYA KUSUMA**

**070810101194**

Pembimbing

**Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Sarwedi, M.M.**

**Dosen Pembimbing II : Dr. Lilis Yulianti, S.E., M.M**

## ABSTRAKSI

Indonesia sebagai negara maritim memiliki pantai terpanjang nomor dua di dunia. Sektor maritim yang seharusnya menjadi primadona dalam menggerakkan perekonomian ternyata tidak mendapat perhatian dari pemangku kebijakan. Semua itu menjadi sesuatu yang paradoks jika mengingat potensi yang ada.

Penelitian dengan judul "Analisis Kebijakan Pembangunan Wilayah Pesisir Terhadap Keberdayaan Istri Nelayan Melalui Peran Koperasi", bertujuan (a) menganalisis konsep kebijakan pembangunan wilayah berbasis pemberdayaan istri nelayan melalui peran koperasi LEPP-M3 di Kabupaten Jember, (b) mendeskripsikan pandangan *expert* terkait kebijakan pembangunan wilayah berbasis pemberdayaan istri nelayan melalui peran koperasi LEPP-M3 di Kabupaten Jember yang ditinjau dari aspek efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan, (c) menganalisis konsep kebijakan pembangunan wilayah berbasis pemberdayaan istri nelayan melalui peran koperasi LEPP-M3 di Kabupaten Jember menurut pandangan *expert*.

Pendekatan kajian ini dilakukan melalui metode studi literatur yang berhubungan serta survey lapangan baik melalui kuisioner maupun wawancara kepada narasumber yang kompeten (*key person*). Survey dilaksanakan di kecamatan Puger dengan fokus dua desa yang merupakan basis masyarakat nelayan yakni, Desa Puger Wetan, dan Desa Puger Kulon. Melalui metode Analitik Hirarki Proses (AHP), penelitian ini menempatkan 5 responden ahli (*expert choice*) untuk membantu mengurai pokok permasalahan secara komprehensif.

Secara umum hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efisiensi menjadi aspek yang paling signifikan menerima dampak kebijakan pembangunan wilayah berbasis pemberdayaan istri nelayan. Dari 4 level dalam studi AHP, level 1 menunjukkan skala prioritas secara berurutan diperoleh aspek efisiensi dengan bobot nilai (0,300), berikut aspek efektivitas (0,269), aspek responsivitas (0,260), dan aspek ketepatan (0,169). Adapun kriteria level 2 dari masing-masing aspek memperlihatkan 4 kriteria dampak yang dominan, yaitu berfungsinya kelompok masyarakat, pemanfaatan koperasi, ketergantungan terhadap program, dan terciptanya kesempatan kerja baru.

Selanjutnya, dari hasil level 1 dan level 2 tersebut mendorong level 3 untuk memberikan alternatif perlunya kebijakan baru yang lebih baik dalam penerapan konsep kebijakan pembangunan wilayah pesisir terhadap keberdayaan istri nelayan melalui peran koperasi di Kecamatan Puger. Pada level akhir tawaran konsep kebijakan pembangunan wilayah pesisir terhadap keberdayaan istri nelayan melalui peran koperasi di Kecamatan Puger menjadi penting untuk diterapkan dengan model perencanaan yang berkelanjutan (*sustainability planning*).

**Kata Kunci : Kebijakan Pembangunan Wilayah Pesisir, Keberdayaan Istri Nelayan, Peran Koperasi, Analisis Deskriptif, Analitik Hirarki Proses (AHP).**



## ABSTRACT

*Indonesia as maritime country has the second-longest shore in the world. Maritime that should become main sector on economics movement, comes up abandoned by the government as the policy maker. All those things become paradox remembering the potential that we have.*

*Research titled "Analysis of Coastal Development Policy to the Fisherman's Wife Empowerment through Cooperative Role (Case Study of Household Kecamatan Puger) aims to (a) analyze the concept of coastal development policy to the fisherman's wife empowerment through LEPP-M3cooperative role in Puger, Jember, (b) describe expert's view in relation to coastal development policy to the fisherman's wife empowerment through LEPP-M3cooperative role based on effectiveness, efficient, responsiveness, precision, in Puger, Jember, (c) analyze the concept of coastal development policy to the fisherman's wife empowerment through LEPP-M3cooperative role to the experts.*

*This study applies literature studies including field survey through questionnaires and interview to the competent informant (key person). The survey is conducted in Puger area located in Jember and focused on 2 (two) villages which sustain the biggest fisherman. They are Puger Kulon, and Puger Wetan. Through AHP, the Analytical Hierarchy Process, this study employs 5 expert respondents to support discussing the primary problem comprehensively.*

*Generally, result of this research can be concluded that efficiency, which is regarded as the most significant aspect, receiving impact of coastal development policy to the fisherman's wife empowerment through LEPP-M3cooperative role. Among the four level of AHP, level 1 show priority scale threaded efficiency achieved which scored (0,300), effectiveness aspect (0,269), responsiveness (0,260), precision (0,169). Level 2, of each aspect, show four categories of different dominant impact: functionally of civil society, empowerment of cooperative, dependencies on program, availability of new work-field.*

*Furthermore, result of level 1 and 2 above drive level 3 to give new and better alternative policies toward coastal development to the fisherman's wife empowerment trough LEPP-M3cooperative role. At the last level, the concept of coastal development policy is considered vital to be applied in terms of sustainability model.*

**Key Words :** *Coastal Development Policy, Fisherman's Wife Empowerment, Cooperative role, Descriptive Analysis, Analytical Hierarchy Process*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmatNya. Skripsi yang penulis ajukan merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang amat besar kepada ;

1. Bapak Prof. Dr. Sarwedi M.M. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Lilis Yuliati S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang perhatian dan sabar memberikan segenap waktu dan pemikiran, bimbingan, semangat, juga nasehat yang sangat bermanfaat sehingga terselesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Badjuri M.E., Dr. Sebastiana Viphindrartin M.Kes, dan Drs. Sunlip Wibisono M.Kes selaku Tim Penguji.
3. Bapak Dr. Rafael Purtomosomaji, M.Si. sebagai pemantik ide dasar dari pembuatan skripsi bagi penulis.
4. Bapak Drs. Kusnadi M.A., terima kasih telah menjadi rekan diskusi dan motivator penulis.
5. Teristimewa Ibu dan Bapakku. Terima kasih teramat atas moril dan materiil, juga semangat, doa, nasehat, kasih sayang, dan juga perhatian.
6. Lima responden *expert*, Bapak Kusnadi, Bapak Mahfud Efendi, Mas Abu Hasan, Mbak Fatimah, dan Arys Aditya. Terima kasih atas waktunya dan kesediaannya melengkapi pemahaman penulis atas bahasan penelitian ini, semoga kita semua senantiasa terberkati.
7. Tria Apriliana yang kerap mengingatkan melalui frasa, tidak ada yang sia-sia, terima kasih atas pengertiannya.
8. Kawan-kawan LPME ECPOSE, Maznifar A, Totok H, Ginanjar PU, Kasiful A, Hendro P, Arimacs W, Aulia R, Nody A, Neny A, Wafdaa H, Musa A, Dedi S, Wiwik L, F. Yasin, Prasetyo D, Arga B, Sofian, Res kaori, Agus F, Hanum, Titis, Pak Didik, Rully, Jim Beglin, Pak Burasmin, bercengkerama dengan mereka menjadi penambah cita penulis.
9. Rekan Imanda Dea Sabiella yang menjadi teman diskusi penulis.

10. Kawan-kawan paguyuban rioyoan, M. Fajriansyah, Arys A, Aji Fatwa, Guido Giusti, Mel Alfa Toni, Novan Adi, bergumul dengan mereka menjadi penyemai asa penulis.
11. Kioen, pendengar yang baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik karena keterbatasan ilmu yang dimiliki maupun kesalahan dari pihak pribadi. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi almamater tercinta, serta bagi setiap pembaca pada umumnya.

Jember, 29 September 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	vii
<b>RINGKASAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	7
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
<b>2.1 Pengertian Kebijakan</b> .....	8
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik .....	9
2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik .....	12
2.1.3 Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan .....	13

2.2 Analisis Kebijakan .....	16
2.3 Teori Pembangunan Ekonomi .....	18
2.4 Konsep Wilayah .....	19
2.5 Konsep Pembangunan Wilayah .....	19
2.6 Konsep Pembangunan Berkelanjutan .....	20
2.7 Konsep Perencanaan .....	21
2.8 <i>Participatory Planning</i> .....	22
2.9 <i>Sustainability Planning</i> .....	23
2.10 <i>Strategic Planning</i> .....	23
2.11 Konsep Pemberdayaan .....	24
2.12 Proses Hirarki Analitik (AHP) .....	25
2.13 Penelitian Terdahulu .....	26
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Rancangan Penelitian .....	29
3.2 Objek dan Lokasi Penelitian .....	29
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	30
3.3.1 Wawancara .....	30
3.3.2 Observasi .....	31
3.3.3 Studi Dokumentasi .....	31
3.4 Metode Analisis Data .....	32
3.4.1 Analisis Data Deskriptif .....	32
3.4.2 Analisis Data AHP .....	33
3.5 Definisi Operasional .....	39
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
4.1.1 Kabupaten Jember .....	45

4.1.2 Kecamatan Puger Kabupaten Jember .....	46
<b>4.2 Isu Pembangunan Wilayah Pesisir Kecamatan Puger .....</b>	<b>47</b>
<b>4.3 Hasil dan Pembahasan .....</b>	<b>49</b>
4.3.1 Analisis Deskriptif Pembangunan Wilayah Pesisir Berbasis Keberdayaan Istri Nelayan Melalui Peran Koperasi .....	49
4.3.2 Analisis Hasil Studi AHP .....	59
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
5.1 Kesimpulan .....	67
5.2 Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>75</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1.1 Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012.....	4
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	27
3.1 Skala Banding Secara Berpasangan .....	35
3.2 Contoh Matriks Perbandingan .....	38
3.3 Definisi Operasional .....	39
4.1 Hasil Pembobotan Jawaban Prioritas Aspek Level 1.....	60
4.2 Hasil Pembobotan Jawaban Prioritas Kriteria Level 2 .....	61
4.3 Hasil Pembobotan Jawaban Prioritas Kriteria Level 3 .....	62
4.4 Hasil Pembobotan Jawaban Prioritas Alternatif per Kriteria Level 3.....	63
4.5 Hasil Pembobotan Model .....	66

## DAFTAR GAMBAR

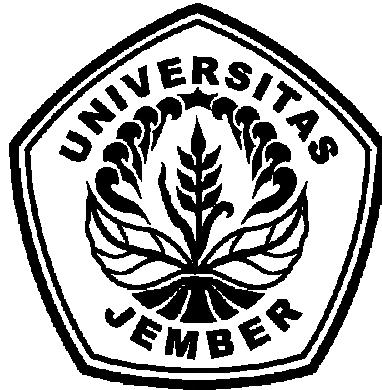
Gambar	Halaman
2.1 Proses Analisis Kebijakan Dasar Secara Umum (Catanese, A.J & Syner, J.C. (ed), 1988) .....	17
3.1 Contoh Penyusunan Hirarki dalam Studi AHP .....	34
3.2 Hirarki Kebijakan Pembangunan Wilayah Pesisir Terhadap Keberdayaan Istri Nelayan Melalui Peran Koperasi .....	44
4.1 Lembaga Keuangan Menciptakan Berfungsinya Modal Sosial .....	50
4.2 Lembaga Keuangan Menjangkau Seluruh Pelaku Ekonomi .....	50
4.3 Lembaga Keuangan Menguatkan Ketrampilan Kerja .....	51
4.4 Lembaga Keuangan Telah Berevolusi Dalam Penyaluran Kredit .....	52
4.5 Lembaga Keuangan Mengakibatkan Pergerakan Barang & Jasa .....	52
4.6 Lembaga Keuangan Membuka Peluang Produktivitas .....	53
4.7 Lembaga Keua. Mendampingi Anggota Secara Formal dan Non-Formal .....	54
4.8 Lembaga Keuangan Justru Menimbulkan Kebergantungan Tinggi .....	54
4.9 Lembaga Keuangan Menciptakan Lapangan Kerja Baru .....	55
4.10 Lembaga Keuangan Menciptakan Berfungsinya Modal Sosial .....	56
4.11 Lembaga Keuangan Menciptakan Perubahan Pola Pikir Masyarakat .....	57



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran	Halaman
1. Hirarki Dalam Studi AHP .....	75
2. Kuisisioner AHP .....	83
3. Kuisisioner Deskriptif.....	85
4. Rekapitulasi Kuisisioner Deskriptif.....	86
5. Rekapitulasi data AHP .....	89

**Analisis Kebijakan Pembangunan Wilayah  
Pesisir Terhadap Keberdayaan Istri Nelayan Melalui Peran Koperasi  
(Studi Kasus Rumah Tangga Masyarakat Pesisir Kecamatan Puger)**



SKRIPSI

Oleh:  
**Edho Cahya Kusuma**  
(NIM 070810101194)

**ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS JEMBER  
2014**

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara maritim yang lebih kurang terdapat 18.000 pulau. Sebagai negara maritim Indonesia memiliki panjang bibir pantai 81.290 km atau negara dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada (Haryo, 2007). Adapun luas laut yang dimiliki Indonesia sekitar 5,2 juta km<sup>2</sup>, dengan potensi sumber daya di dalamnya yang kaya (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2001).

Dalam setahun Indonesia setidaknya mampu menghasilkan 6,4 juta ton ikan. Dari seluruh potensi sumber daya perikanan tersebut, jumlah tangkapan yang dihasilkan pada 2008 mencapai 4,7 juta Ton dengan nilai produksi sebesar 50,86 Milyar rupiah. Sementara itu, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 5,12 juta Ton pertahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari (Nadjib, 2009; Jurnal Ekonomi Pembangunan – LIPI).

Namun demikian, sekitar 32,14 persen penduduk (5.254.400 jiwa) dari jumlah masyarakat pesisir 16.420.000 jiwa tersebar pada 8.090 desa pesisir masih hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut data Maret 2006, jumlah total penduduk miskin di Indonesia mencapai sekitar 39,05 juta jiwa atau 17,75% dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 222 juta jiwa. Dengan demikian, jumlah penduduk miskin di kawasan pesisir sebesar 13,45% dari total penduduk miskin Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa kawasan pesisir merupakan salah satu kantong kemiskinan nasional yang potensial dan menyumbang terhadap berlangsungnya keterbelakangan sosial (Kusnadi, 2009: 64).

Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat pesisir merupakan dampak dari beberapa faktor. Menurut Siswanto, kemiskinan yang terjadi pada masyarakat pesisir adalah merupakan kegagalan pemerintah dalam kebijakan pembangunan di sektor kelautan dan perikanan. Kegagalan ini diakui oleh pemerintah. Antara lain, prasarana pelabuhan perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di

berbagai wilayah belum memberikan kontribusi memuaskan dalam peningkatan kesejahteraan nelayan. Modernisasi perikanan (revolusi biru) belum menghapus kemiskinan, dan ketimpangan serta kuatnya hubungan *patron-client* dalam komunitas nelayan (Budi: 2008)

Sedangkan menurut Kusnadi dalam bukunya *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir* menyebutkan bahwa persoalan yang dihadapi nelayan berkisar pada hal-hal yang berhubungan dengan isu-isu: (1) kemiskinan dan kesenjangan sosial, (2) keterbatasan akses modal, teknologi, pasar, (3) kualitas SDM yang rendah, (4) degradasi sumberdaya lingkungan, dan (5) kebijakan pembangunan yang belum memihak secara optimal pada masyarakat nelayan.

Disamping itu iklim merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan masyarakat pesisir. Masa panen dan paceklik merupakan dua jenis musim yang dikenal nelayan. Dimana ketika panen tiba pola hidup masyarakat pesisir akan cenderung konsumtif. Saat paceklik datang yang terjadi justru sebaliknya. Tidak jarang rumah tangga nelayan terpaksa menggadaikan semua barang yang ketika musim panen dibelinya.

Sementara itu dalam siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan No.B.22/PDSI/HM.310/II/2012, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo datangnya angin musim barat yang sering menimbulkan cuaca ekstrim dan gelombang tinggi masih menjadi masalah bagi para nelayan. Akibatnya, masa paceklik ikan terjadi di seluruh sentra ikan di Indonesia, seperti di Sulawesi, Maluku, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara, dan Yogyakarta.

Namun kini sektor kelautan dan perikanan telah mendapat perhatian dari pemerintah. Terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah. Kemudian diperkuat dengan Nomenklatur Departemen menjadi Kementerian: Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden No. No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012).

Satu dari sekian banyak program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memberi perhatian khusus terhadap upaya meningkatkan keberdayaan

masyarakat pesisir adalah dengan adanya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang sejak tahun 2001 ditetapkan.

Upaya-upaya untuk mencapai tujuan pemberdayaan harus disertai dengan pilihan pendekatan yang tepat. Dibandingkan dengan pendekatan individual, pendekatan kelembagaan berbasis kepentingan kelompok atau kolektivitas merupakan pendekatan yang banyak dipilih untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan. Pendekatan ini dianut oleh program PEMP dengan membangun koperasi LEPP-M3 (Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro, Mitra, Mina) beserta unit-unit usahanya, seperti LKM, BPR Pesisir, Kedai Pesisir, SPDN (Solar Paket Dealer Nelayan), Perbengkelan, dan sebagainya, yang dirancang untuk masa depan sebagai *holding company* masyarakat pesisir (Kusnadi, 2009:32).

Keberadaan koperasi sebagai bentuk lanjutan dari program PEMP menjadi menarik untuk disimak. Program PEMP yang bertujuan mengatasi kemiskinan serta mengembangkan perekonomian masyarakat pesisir, menurut Kusnadi, dirancang dengan menggunakan pendekatan kelembagaan melalui pembentukan Koperasi LEPP-M3. Sasaran program PEMP melalui Koperasi LEPP-M3 adalah pelaku usaha perikanan tangkap skala mikro, pelaku usaha perikanan budidaya skala mikro, pelaku usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro, dan pelaku usaha industri dan jasa maritim skala mikro dengan prioritas; pemuda, perempuan pesisir, jenis usaha yang tidak merusak lingkungan dan tergolong miskin (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2012). Hal ini tentu sejalan dengan ketentuan *Asian Development Bank*, bahwa kegiatan pemberdayaan sosial ekonomi terhadap kelompok-kelompok masyarakat demikian harus memiliki sifat: berbasis lokal (mikro), berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, berbasis kemitraan, holistik, dan berkelanjutan (Zubaedi, 2007:99 dalam Kusnadi, 2009: 65).

Sementara itu, merujuk pada laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012 perkembangan beberapa sektor yang tercakup sebagai instrumen PEMP untuk provinsi Jawa Timur yakni sebagai berikut.

Tabel 1.1Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012

No	Keterangan	Tahun					Pertumbuhan rata-rata (%)
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	Jumlah perusahaan perikanan (buah)	56.842	52.643	56.183	61.183	57.018	0,36
2	Jumlah nelayan di laut (orang)	209.137	201.925	216.856	278.980	250.881	5,36
3	Jumlah kapal penangkap (buah)	54.198	51.232	54.596	60.580	57.607	1,79
4	Jumlah perahu tanpa motor (buah)	6.996	6.686	6.944	6.489	6.272	-2,62
5	Jumlah unit penangkapan ikan (pukat tarik, pukat cincin, pukat kantong, jaring, pancing, perangkap, dll)—(unit)	92.333	105.257	162.120	168.944	97.842	7,54
6	Volume produksi perikanan tangkap (ton)	374.620	382.877	394.262	395.510	338.918	-2,20
7	Volume produksi (VPPT) perikanan tangkap untuk dipasarkan (ton)	141.059	144.925	188.048	195.291	189.704	8,37
<b>Terkait dengan pemberdayaan perempuan</b>							
1	VPPT untuk penggaraman/pengeringan (ton)	63.274	60.749	55.489	900	57.829	1.553
2	VPPT untuk peragian-terasi, peda, kecap ikan (ton)	9.929	8.746	10.169	3.452	4.253	-9,62
3	VPPT untuk pemindangan (ton)	55.757	50.864	43.654	43.111	37.195	-9,48
4	VPPT untuk pengasapan (ton)	14.255	13.317	7.697	20.189	14.298	19,37
5	VPPT untuk tepung (ton)	23.952	31.947	7.661	17.132	2.925	-0,49
6	VPPT untuk kering/asin (ton)	28.111	34.765	34.204	27.365	30.622	3,49

Sumber: laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012

Strategi pemberdayaan untuk mengatasi kemiskinan dapat ditempuh dengan mengembangkan dua model beserta variasinya. *Pertama*, model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis pranata budaya atau kelembagaan sosial, dan *kedua*, model pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis gender (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012).

Oleh karena itu dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, isu substansial yang selalu dihadapi oleh keluarga atau rumah tangga adalah bagaimana individu-individu yang ada di dalamnya harus berusaha maksimal dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga kelangsungan hidupnya terpelihara (Nye, 1982: 33 -34). Setiap anggota rumah tangga harus memiliki kemauan mencari nafkah, betapapun kecilnya perolehan nafkah itu. Anggota-anggota rumah tangga juga harus memiliki kepedulian terhadap kelangsungan hidup rumah tangga di atas kepentingan-kepentingan pribadi (Koos, 1973: 33).

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten penerima Program PEMP tahun 2003 dan 2006. Dari total dana ekonomi produktif PEMP 2003 sebesar Rp 869.000.000 atau sekitar 92,82 persen sudah disalurkan kepada masyarakat. Namun pengelolaan dana program PEMP tersebut mengalami kegagalan karena sebagian besar dana yang disalurkan tidak dapat digulirkan secara berkelanjutan (Kusnadi, 2009: 67).

Melihat realita lapangan sebagaimana di atas dan pertimbangan latar belakang kondisi masyarakat pesisir serta peran perempuan dalam rumah tangga, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, studi ini bertujuan untuk melakukan evaluasi kebijakan pembangunan wilayah berbasis pemberdayaan perempuan dalam rumah tangga masyarakat pesisir kaitannya dengan kebijakan PEMP melalui peran koperasi Koperasi LEPP-M3 Desa Puger Kulon dan Puger Wetan Kecamatan Puger Kabupaten Jember dengan Model Perencanaan Pembangunan Secara Terpadu.



Secara lebih detail penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara jelas mengenai permasalahan implementasi kebijakan khususnya peran Koperasi LEPP-M3. Sebagai bahan kajian, dipilih secara khusus pendekatan perencanaan pembangunan, khususnya mengenai perencanaan pembangunan secara terpadu pemberdayaan masyarakat pesisir.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka secara ringkas masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana analisis deskriptif kebijakan pembangunan wilayah pesisir terhadap keberdayaan istri nelayan Desa Puger Wetan dan Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember melalui peran Koperasi LEPP-M3?
2. Bagaimana pandangan *expert* terkait kebijakan pembangua wilayah berbasis pemberdayaan istri nelayan pesisir Desa Puger Wetan dan Puger Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember melalui peran Koperasi LEPP-M3 ditinjau dari aspek efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan?
3. Bagaimana konsep kebijakan pembangunan wilayah berbasis pemberdayaan istri nelayan dalam rumah tangga masyarakat pesisir dalam persepsi *expert*?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis konsep kebijakan pembangunan wilayah berbasis pemberdayaan istri nelayan melalui peran Koperasi LEPP-M3;
2. Mendeskripsikan pandangan *expert* terkait kebijakan pembangunan wilayah pesisir terhadap keberdayaan istri nelayan Desa Puger Wetan dan Puger

Kulon Kecamatan Puger Kabupaten Jember melalui peran Koperasi LEPP-M3 ditinjau dari aspek efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan ketepatan;

3. Menganalisis konsep kebijakan pembangunan wilayah pesisir terhadap keberdayaan istri nelayan dalam persepsi *expert*.

Dimana dari ketiga tujuan di atas, diharapkan dapat diidentifikasi model pemberdayaan perempuan rumah tangga masyarakat pesisir dalam konteks wilayah Puger Kabupaten Jember sebagai daerah yang berpotensi akan sumber daya alam.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Setelah penelitian ini selesai dilakukan, diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya adalah.

1. Untuk kepentingan pustaka, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pengembangan ekonomi kewilayahan.
2. Peran pembuat kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada pemerintah daerah Jember. Setidaknya sebagai tambahan evaluasi, khususnya evaluasi tentang kebijakan pemberdayaan perempuan dalam masyarakat pesisir pasca PEMP 2006 yang telah dilaksanakan oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan.
3. Bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat akademik, semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi pada penelitian yang relevan.